

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Zulaikha¹, Frini Agustina², Narti³, Putri Nuraini⁴, Muhammad Taura Islamy⁵

¹ Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun, zulaekahekha@gmail.com¹

² Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun, friniagustin6@gmail.com²

³ Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun, nartiratih47@gmail.com³

⁴ Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun, NurainiP878@gmail.com⁴

⁵ Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun, coachtaura@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, tantangan, dan alternatif strategis manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan Islam. Mengingat ketidakstabilan keuangan akibat ketergantungan pada dana konvensional dan kebutuhan mendesak akan transformasi digital, makalah ini berpendapat bahwa mengintegrasikan perencanaan keuangan strategis dengan pendanaan alternatif berbasis syariah sangat penting untuk mencegah stagnasi institusional dan menjaga kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, tantangan, dan alternatif strategis manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan Islam. Mengingat ketidakstabilan keuangan akibat ketergantungan pada dana konvensional dan kebutuhan mendesak akan transformasi digital, penelitian ini berpendapat bahwa mengintegrasikan perencanaan keuangan strategis dengan pendanaan alternatif berbasis syariah sangat penting untuk mencegah stagnasi institusional dan menjaga kepercayaan publik. Manajemen keuangan pendidikan Islam secara unik mengintegrasikan teknik administrasi dengan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan barakah. Namun, lembaga-lembaga tersebut menghadapi defisit pendanaan operasional yang kritis karena siklus donasi yang berfluktuasi dan latar belakang pendapatan siswa yang rendah, yang secara langsung menghambat investasi infrastruktur digital. Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, lembaga-lembaga harus beralih ke model alternatif yang berkelanjutan, termasuk wakaf produktif, zakat pendidikan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan platform crowdfunding berbasis syariah. Karena penelitian ini sepenuhnya bergantung pada tinjauan literatur (data sekunder), temuan-temuan tersebut menghadapi keterbatasan dalam generalisasi langsung terhadap kendala empiris spesifik yang dihadapi oleh masing-masing sekolah. Penelitian selanjutnya harus menerapkan studi kasus empiris atau penilaian lapangan untuk mengevaluasi implementasi praktis crowdfunding digital di sekolah-sekolah Islam pedesaan.

Kata Kunci : *Manajemen Pembiayaan, Pendidikan Islam, Prinsip Syariah*

ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation, challenges, and strategic alternatives regarding financial management in Islamic educational institutions. Given the financial instability resulting from reliance on conventional funding and the urgent need for digital transformation, this study argues that integrating strategic financial planning with Sharia-based alternative funding is crucial to preventing institutional stagnation and maintaining public trust. Islamic educational financial management uniquely integrates administrative techniques with Sharia principles such as **amanah** (trustworthiness), justice, and **barakah** (divine blessing). However, these institutions face critical operational funding deficits due to fluctuating donation cycles and the low-income backgrounds of students, which directly hinder investment in digital infrastructure. To maintain a competitive edge, institutions must shift toward sustainable alternative models, including productive **waqf** (endowment), educational **zakat** (almsgiving), corporate social responsibility (CSR), and Sharia-based crowdfunding platforms. As this study relies entirely on a literature review (secondary data), the findings are limited regarding direct generalization to the specific empirical constraints faced by individual schools. Future research should employ empirical case studies or field assessments to evaluate the practical implementation of digital crowdfunding in rural Islamic schools.*

Keywords: *Financing Management, Islamic Education, Sharia*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan suatu bangsa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam konteks pendidikan Islam, lembaga pendidikan tidak hanya dituntut untuk mencetak peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk kepribadian muslim yang berakhlak mulia, beriman, serta memiliki kepedulian sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan Islam memerlukan dukungan sumber daya yang memadai, baik dari aspek tenaga pendidik, sarana prasarana, kurikulum, maupun pembiayaan.

Pembiayaan pendidikan menempati posisi strategis dalam keseluruhan manajemen pendidikan. Hal ini karena setiap kegiatan pendidikan, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik, memerlukan dukungan dana untuk dapat berjalan dengan baik. Pengadaan sarana pembelajaran, peningkatan mutu guru, penyediaan fasilitas belajar, hingga pemeliharaan lembaga, semuanya sangat bergantung pada sistem pembiayaan yang terencana, terorganisir, dan transparan. Tanpa adanya sistem pembiayaan yang baik, lembaga pendidikan Islam akan kesulitan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan (Nurlaila et al., 2025).

Lembaga pendidikan Islam saat ini menuntut pengelolaan yang selaras antara tuntutan zaman dan ajaran agama. Banyak madrasah serta pesantren menghadapi kendala seperti fasilitas terbatas dan kurikulum yang kurang adaptif, sehingga kualitas pendidikan sering kali tidak optimal. Prinsip manajemen pendidikan Islam hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dalam setiap proses pengelolaan. Globalisasi membawa persaingan ketat bagi lembaga pendidikan berbasis Islam di Indonesia, di mana hanya sekitar 20%

madrasah yang mencapai standar nasional. Faktor utama penyebabnya adalah kurangnya penerapan manajemen sistematis, seperti perencanaan berbasis visi Islam dan pengawasan yang transparan (Amaliya & Anwar, 2026).

Salah satu masalah penting dalam dunia pendidikan adalah masih rendahnya kualitas pendidikan. Pada hakikatnya, faktor utama yang menentukan kualitas tersebut adalah pada proses belajar mengajar. Untuk mendukung hal tersebut akan sulit tercapai apabila tidak didukung dengan penyediaan biaya yang memadai. Upaya menyelenggarakan dan meningkatkan sistem pendidikan yang berkualitas, biaya merupakan komponen yang sangat penting, dan dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Dalam hal ini Keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar dalam setiap pengelolaan pendidikan, karena seluruh komponen pendidikan di madrasah erat kaitannya dengan keuangan. Dalam pengelolaan pembiayaan ini membutuhkan suatu manajemen yang baik dan transparan (Weni & Isfaiyah, 2024).

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa terdapat 8 standar Nasional Pendidikan, yaitu: 1) Standar Isi; 2) Standar Proses; 3) Standar Kompetensi Lulusan; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan; dan 8) Standar Penilaian Pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 ayat 1.). Pemerintah telah menetapkan 8 standar tersebut sebagai acuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Standar pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dapat dikatakan tanpa adanya biaya, segala aktivitas pendidikan tidak akan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan nilai moral generasi penerus bangsa. Untuk mewujudkan peran tersebut secara optimal, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang efisien dan tepat sasaran. Pengelolaan dana dalam pendidikan Islam meliputi berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan, yang bertujuan untuk menjamin kontinuitas dan kualitas proses pembelajaran (Salsabila & Karim, 2025). Namun demikian, salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam manajemen keuangan pendidikan Islam adalah keterbatasan sumber dana. Banyak lembaga pendidikan Islam, terutama yang bersifat swasta atau berbasis komunitas, sangat bergantung pada dukungan masyarakat seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sayangnya, pengelolaan dana dari sumber-sumber tersebut masih sering dilakukan secara kurang optimal, baik dalam aspek perencanaan maupun pelaporan. Hal ini tidak hanya menghambat pencapaian tujuan pendidikan, tetapi juga dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan dan kredibilitas lembaga pendidikan Islam itu sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), di mana fokus utamanya adalah mengkaji, menganalisis, dan menyintesis literatur serta hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan Islam. Target dan subjek penelitian ini bukan berupa populasi atau sampel manusia, melainkan dokumen,

jurnal ilmiah, buku, serta artikel akademik terkait yang relevan dengan topik bahasan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri sumber data sekunder, sementara instrumen penelitian dikembangkan dalam bentuk panduan kodifikasi dan matriks analisis konten untuk menyaring informasi penting secara sistematis. Selaku instrumen kunci, kehadiran peneliti sangat mutlak dalam seluruh proses, mulai dari pencarian, pemilihan, hingga interpretasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis tematik, di mana data yang terkumpul dipilah, dikategorikan, dan dihubungkan antarteks untuk menarik kesimpulan yang mendalam. Lokasi penelitian dilakukan secara virtual melalui akses ke berbagai pangkalan data jurnal digital (e-journal) dengan durasi pelaksanaan yang terukur dari tahap perencanaan hingga penulisan hasil. Terakhir, pengecekan keabsahan hasil penelitian dilakukan melalui teknik triangulasi sumber data, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dan pandangan para ahli guna memastikan objektivitas, validitas, serta reliabilitas pembahasan yang dihasilkan.

HASIL

Konsep Dasar Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dan tidak dapat terpisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar disekolah. Dalam rangka pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau biaya pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan SDM yang tepat guna dan berhasil. Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan daritahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program yang ingin dicapai. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut sumber-sumber dana, tetapi juga meliputi penggunaan secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai suatu lembaga pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah menitikberatkan upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya. Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung, infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan dan sebagainya. Jadi dapat diartikan bahwa pembiayaan pendidikan Islam adalah merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana yang diterima dan bagaimana cara penggunaan dana untuk kemaslahatan sekolah agar tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan efektif dan efisien (Suningsih et al., 2022).

Manajemen pembiayaan pendidikan Islam merupakan salah satu bagian dari manajemen pendidikan yang memfokuskan pada pengelolaan sumber daya keuangan di lembaga pendidikan Islam. Pembiayaan dipandang sebagai “darah” bagi keberlangsungan lembaga pendidikan, karena tanpa dana yang cukup, proses pembelajaran tidak akan berjalan secara optimal.

Menurut Mulyasa, manajemen pembiayaan pendidikan adalah suatu proses pengelolaan sumber daya keuangan melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka menunjang tujuan pendidikan. Sementara itu, Mujamil Qomar menekankan bahwa dalam perspektif pendidikan Islam, manajemen pembiayaan tidak hanya berbasis pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai syariah, seperti amanah, keadilan, dan keberkahan.

Dari kedua pandangan tersebut dapat dipahami bahwa manajemen pembiayaan pendidikan Islam memiliki dua dimensi penting:

- a. Dimensi teknis-administratif, yaitu bagaimana dana direncanakan, dialokasikan, dan dipertanggungjawabkan.
- b. Dimensi spiritual-moral, yaitu bagaimana dana dikelola sesuai syariah, bersumber dari yang halal, serta digunakan untuk kemaslahatan umat (Nurlaila et al., 2025).

Penerapan Syariah dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam dan Pengelolaannya

Salah satu aspek krusial dalam manajemen institusi pendidikan adalah pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam. Pengelolaan ini tidak hanya mengedepankan efisiensi, tetapi juga harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana. Keberlangsungan dan kredibilitas institusi pendidikan Islam sangat bergantung pada penerapan prinsip syariah, yang meliputi amanah, keadilan, dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Jinan et al. (2024) menyatakan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan faktor penting dalam menjaga integritas lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik. Amanah dalam konteks ini berarti bahwa pengelola dana pendidikan harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait penggunaan dana, sementara akuntabilitas tercermin dalam pertanggungjawaban yang jelas dan terukur. Prinsip keadilan juga menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa distribusi dana dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif (Akhyar, 2026). Pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk tujuan moral dan etika pendidikan Islam, di samping kepentingan operasional. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pengelolaan dana pendidikan Islam, penerapan prinsip-prinsip syariah harus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

Digitalisasi telah menjadi tantangan signifikan bagi institusi pendidikan Islam dalam pengelolaan dana mereka. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang untuk memperkenalkan sistem pembayaran dan pengelolaan dana yang lebih transparan, akurat, dan efektif. Dengan adanya digitalisasi, institusi-institusi ini juga dapat mengakses berbagai sumber pendanaan baru, seperti crowdfunding dan platform online lainnya. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tetap sesuai dengan prinsip syariah, serta menghindari praktik-praktik yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian dengan ajaran Islam.

Prinsip manajemen pendidikan Islam berpijak pada Al-Qur'an dan Hadits, menekankan elemen seperti amanah, musyawarah, dan ikhlas dalam bekerja. Konsep ini mencakup tahap perencanaan strategis hingga evaluasi berkelanjutan, yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan duniawi dan ukhrawi. Penerapannya memerlukan komitmen pemimpin untuk menjadikan lembaga

sebagai wadah pembentukan insan kamil (Amaliya & Anwar, 2026). Mengoptimalkan manajemen keuangan pendidikan berbasis syariah di lembaga pendidikan Islam melibatkan integrasi nilai-nilai keuangan Islam untuk meningkatkan keberlanjutan, transparansi, dan efisiensi. Pendekatan ini menjadi penting mengingat banyak lembaga pendidikan Islam masih bergantung pada sumber pendanaan konvensional yang cenderung tidak stabil (Akhyar, 2026). Oleh karena itu, diperlukan alternatif sistem pembiayaan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tantangan Pembiayaan Lembaga Pendidikan Islam

Perkembangan teknologi memberikan peluang besar dalam mendukung optimalisasi manajemen keuangan pendidikan Islam. Penerapan sistem keuangan digital dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam pengelolaan dana. Namun demikian, implementasi teknologi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi (Akhyar, 2026). Keterbatasan dana operasional merupakan tantangan yang paling krusial bagi banyak lembaga pendidikan Islam, khususnya yang berstatus swasta dan tidak menerima dukungan penuh dari anggaran pemerintah. Sebagian besar lembaga ini mengandalkan sumber pembiayaan konvensional seperti SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dari peserta didik, donatur individu, serta infak masyarakat. Namun, pola pembiayaan ini bersifat tidak stabil dan fluktuatif, karena sangat tergantung pada kondisi ekonomi wali murid serta siklus donasi yang tidak pasti (Sutrisno, 2020).

Lebih lanjut, banyak lembaga pendidikan Islam melayani peserta didik dari kalangan masyarakat ekonomi lemah, yang secara langsung mempengaruhi daya kontribusi mereka terhadap pembiayaan lembaga (Mardhatillah, 2017). Situasi ini membuat pengelola lembaga sulit menaikkan iuran pendidikan tanpa risiko menurunnnya partisipasi siswa. Akibatnya, pemasukan lembaga cenderung terbatas, sehingga menyulitkan pemenuhan kebutuhan operasional dasar seperti pembayaran gaji guru, tunjangan pegawai, perawatan infrastruktur, dan pengadaan alat penunjang pembelajaran (Nasution, 2019).

Kondisi ini juga berpengaruh pada minimnya investasi dalam infrastruktur digital. Padahal, di era modern ini, transformasi digital telah menjadi kebutuhan dasar dalam pengelolaan pembelajaran dan administrasi sekolah. Ketidadaan dana yang cukup menyebabkan banyak lembaga kesulitan mengakses perangkat digital, membangun jaringan internet yang memadai, serta menyelenggarakan pelatihan teknologi bagi tenaga pendidik (Fattah, 2020). Kesenjangan ini menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika lembaga pendidikan umum atau swasta modern telah lebih dahulu melakukan adaptasi digital secara optimal.

Sementara itu, kebutuhan operasional lembaga terus meningkat, tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam aspek digitalisasi, sistem manajemen informasi, dan tuntutan peningkatan mutu layanan pendidikan. Lembaga pendidikan Islam dituntut untuk memiliki sistem pembiayaan yang fleksibel, berkelanjutan, dan mampu mengakomodasi berbagai perubahan dalam lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga harus mulai berpikir untuk mengembangkan model-model pembiayaan alternatif, seperti wakaf produktif, zakat pendidikan, CSR keagamaan, serta memanfaatkan teknologi melalui platform digital seperti crowdfunding syariah dan payment gateway berbasis donasi (Hafidh, 2022).

Jika lembaga pendidikan Islam tidak segera melakukan perencanaan dan manajemen keuangan yang strategis, maka mereka berisiko menghadapi stagnasi

atau bahkan penurunan eksistensi kelembagaan, terutama dalam aspek inovasi, daya saing, dan kepercayaan publik. Tanpa intervensi manajerial yang tepat, lembaga dapat mengalami penurunan jumlah peserta didik, kualitas layanan, dan kredibilitas di mata masyarakat. Oleh karena itu, manajemen pembiayaan yang efektif, inovatif, dan berlandaskan nilai-nilai syariah merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda oleh lembaga pendidikan Islam masa kini.

PEMBAHASAN

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat krusial dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah. Keberadaan anggaran atau biaya pendidikan yang dikelola secara efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam pembentukan potensi sumber daya manusia (SDM) yang tepat guna dan berhasil. Walaupun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah Pendidikan yang murah dan berkualitas, namun Pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan kepada daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab keuangan sekolah. Maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keuangan sekolah tersebut (Indarti et al., 2022). Dalam praktiknya, keberhasilan pembangunan pendidikan sangat bergantung pada kemampuan SDM di lembaga tersebut dalam mengelola dana yang tersedia berdasarkan kebutuhan pokok dan skala prioritas program yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan tidak sekadar berbicara mengenai bagaimana sumber dana diperoleh, melainkan juga berfokus pada minimalisasi biaya melalui sistem pengelolaan yang efisien demi tercapainya visi, misi, dan tujuan strategis lembaga secara optimal.

Pembiayaan pendidikan Islam didefinisikan sebagai seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan pemanfaatan dana untuk kemaslahatan sekolah guna membiayai kebutuhan operasional seperti pengadaan gedung, infrastruktur, peralatan belajar mengajar, serta gaji guru dan karyawan. Manajemen pembiayaan dalam konteks ini memiliki keunikan tersendiri karena mengintegrasikan dua dimensi penting, yaitu dimensi teknis-administratif dan dimensi spiritual-moral. Dimensi teknis-administratif mengatur alur perencanaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban dana secara prosedural. Sementara itu, dimensi spiritual-moral menekankan bahwa pengelolaan keuangan harus bersumber dari hal-hal yang halal dan dikelola berdasarkan nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan keberkahan demi kemaslahatan umat.

Penerapan prinsip syariah menjadi landasan utama yang menjaga integritas serta kredibilitas institusi pendidikan Islam di mata publik. Implementasi nilai amanah menuntut para pengelola dana untuk mampu menjaga kepercayaan pemangku kepentingan melalui transparansi informasi dan akuntabilitas pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, prinsip keadilan wajib ditegakkan untuk memastikan bahwa distribusi dana dilakukan secara proporsional dan tidak diskriminatif, sehingga seluruh alokasi biaya tetap berada pada koridor moral dan etika pendidikan Islam. Konsistensi dalam menerapkan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits ini, seperti musyawarah dan keikhlasan dalam bekerja,

menuntun lembaga bukan hanya untuk mencapai target duniawi melainkan juga tujuan ukhrawi dalam membentuk insan kamil.

Pada era modern, gelombang digitalisasi hadir membawa tantangan sekaligus peluang besar bagi sistem manajemen keuangan berbasis syariah. Di satu sisi, pemanfaatan teknologi digital membuka akses terhadap sumber pendanaan baru yang inovatif seperti platform crowdfunding online dan mempermudah sistem pembayaran yang lebih transparan serta akurat. Namun di sisi lain, institusi pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan bahwa seluruh adopsi teknologi tersebut tetap berjalan selaras dengan koridor syariah, sekaligus menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketidakjelasan (gharar) atau ketidaksesuaian dengan ajaran Islam. Tantangan ini semakin kompleks mengingat masih banyak lembaga yang bergantung pada model pembiayaan konvensional yang tidak stabil.

Keterbatasan dana operasional hingga kini masih menjadi persoalan paling krusial, khususnya bagi lembaga pendidikan Islam swasta yang minim mendapatkan dukungan anggaran penuh dari pemerintah. Sebagian besar lembaga tersebut sangat bergantung pada sumber dana fluktuatif seperti SPP peserta didik, donatur individu, dan infak masyarakat yang kondisinya sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi wali murid. Terlebih lagi, fakta bahwa banyak lembaga pendidikan Islam melayani masyarakat dari kalangan ekonomi lemah membuat pengelola kesulitan menaikkan iuran pendidikan tanpa risiko menurunkan partisipasi siswa. Dampaknya, keterbatasan pemasukan ini menghambat pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk minimnya investasi dalam penyediaan infrastruktur digital dan pelatihan teknologi bagi para tenaga pendidik.

Guna mengatasi ancaman stagnasi dan penurunan daya saing di tengah tuntutan peningkatan mutu, lembaga pendidikan Islam dituntut untuk segera melakukan perencanaan keuangan yang strategis dan fleksibel. Pengelola lembaga harus mulai mengoptimalkan model-model pembiayaan alternatif yang berkelanjutan, seperti pemanfaatan wakaf produktif, zakat pendidikan, CSR keagamaan, serta integrasi teknologi melalui crowdfunding syariah dan payment gateway berbasis donasi. Tanpa adanya intervensi manajerial yang inovatif, efektif, dan berlandaskan nilai syariah, institusi akan menghadapi risiko penurunan jumlah peserta didik dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, transformasi manajemen pembiayaan yang strategis kini menjadi kebutuhan mendesak yang tidak boleh ditunda demi menjaga eksistensi dan kredibilitas lembaga pendidikan Islam.

KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan Islam merupakan komponen vital yang mengintegrasikan dimensi administratif dan nilai syariah seperti amanah, keadilan, dan keberkahan guna mencapai tujuan duniawi maupun ukhrawi. Meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan dana operasional, ketergantungan pada sumber dana yang fluktuatif, serta hambatan digitalisasi, lembaga tidak boleh mengalami stagnasi mutu. Oleh karena itu, pengelola lembaga perlu bergerak responsif dengan melakukan perencanaan strategis serta mengoptimalkan model pembiayaan alternatif yang berkelanjutan, seperti wakaf produktif, zakat pendidikan, dan crowdfunding syariah. Melalui transformasi keuangan yang inovatif, efektif, dan berbasis nilai-nilai Islam ini, lembaga dapat meningkatkan daya saing, mengoptimalkan proses pembelajaran, serta menjaga

mutu dan kepercayaan masyarakat demi keberlangsungan eksistensinya di era modern.

REFERENSI

- Akhyar, Y. (2026). Optimalisasi Manajemen Keuangan Pendidikan Berbasis Syariah di Lembaga Pendidikan Islam. *AT TAJIR: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 1–10.
- Amaliya, R. P., & Anwar, A. M. (2026). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LEMBAGA PENDIDIKAN. *At-Tadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 67–77.
- Indarti, S., Kosmalinda, & Sayyidah, E. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 24 Bandar Lampung. *UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN*, 1(3), 362–370.
- Nurlaila, Farid, N. M., Murziah, Sulistiyawati, R., Nurhawa, & Mashar, A. (2025). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam. *UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN*, 4(2), 155–164.
- Salsabila, A., & Karim, H. A. (2025). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam di Era Digitalisasi dan Tantangan Ekonomi Modern. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(2), 36–48.
- Suningsih, Oktaria, N., Winarti, W., & Murtafiah, N. H. (2022). KONSEP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN & PENDIDIKAN ISLAM*, 1(4), 138–148.
- Weni, S. Y., & Isfaiyah. (2024). Manajemen Pembiayaan pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi di MTsN 9 Nganjuk Provinsi Jawa Timur). *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 27–38.